



LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

2022



Kecamatan Bugul Kidul

Kota Pasuruan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022. Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kota Pasuruan harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik.

Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kota Pasuruan melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan selama tahun 2022. Diharapkan LKjIP Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam periode tahun 2021-2026.

Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Pasuruan.

CAMAT BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN

ALYASA AKBAR, S.STP
Penata TK. I
NIP. 19851029 200412 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan Unsur Kewilayahan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program ini mengammpu Tujuan dari Kecamatan Bugul Kidul yakni Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dengan satu indikatornya yakni : Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi, pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 2 kelurahan dan terealisasi sejumlah 0 kelurahan sehingga capaian sebesar 0 % . Ketidackapaian ini disebabkan belum tersedianya perangkat pendukung dan sistem yang akan digunakan untuk pelayanan terintegrasi. Serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk menjalankan pelayanan tersebut. Diharapkan di Anggaran Tahun Mendatang Pelayanan Terintegrasi di Kelurahan ini dapat dijalankan serta adanya Inovasi Pelayanan yang lebih Optimal.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh satu kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 6 kegiatan dan terealisasi 6 Kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh urusan administrasi masyarakat dalam urusan pemerintahan yang telah dilayani oleh Kecamatan dan Kelurahan se wilayah Bugul Kidul.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban diukur dengan satu indikator yaitu :

1. Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah pengaduan yang masuk dan telah ditindaklanjuti seluruhnya secara tepat waktu. Pengaduan yang masuk yaitu 30 pengaduan di Wilayah kKecamatan Bugul Kidul yaitu Pengaduan Banjir di Kelurahan Blandongan, Kepel, Tapaan, dan Bugul Kidul. Pengaduan yang ditangani secara tepat waktu juga 30 Pengaduan Banjir di 4 Kelurahan tersebut. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh hubungan

koordinasi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal terkait dalam menangani pengaduan masyarakat. Selain itu, pihak Kecamatan juga proaktif dalam menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan koordinasi dan siaga bencana alam secara tepat sasaran.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban didukung oleh satu kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 30 pengaduan dan terealisasi sejumlah 30 pengaduan sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah pengaduan yang telah ditangani. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh peran serta aktif dari sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan dalam mensosialisasikan fungsi kecamatan dan kelurahan sebagai sarana pengaduan yang terdekat dengan masyarakat.

3, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan satu indikator yaitu :

1. Persentase Kelembagaan masyarakat yang dibina, pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah data kelembagaan yang telah dibina oleh Kecamatan Bugul Kidul yaitu 7 lembaga. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh kegiatan pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul serta peran aktif dari Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diinstruksikan oleh pemerintah.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung oleh 2 kegiatan yaitu

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan satu indikator yaitu Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina, pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 7 lembaga dengan capaian sejumlah 7 lembaga atau terealisasi sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada data jumlah lembaga yang telah dibina oleh Kelurahan di wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Kelembagaan yang dibina adalah PKK, Kecamatan Sehat, Layak Anak, UKS, Qori', Penanggulangan Kemiskinan, dan LPM. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh terus berkembangnya lembaga-lembaga masyarakat serta Kelurahan selaku unit perangkat daerah yang aktif dalam membina lembaga-lembaga yang ada dalam wilayahnya.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan diukur dengan indikator Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana, pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 7 kegiatan dengan capaian sejumlah 7 kegiatan . Capaian ini berdasarkan pada jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh kemampuan Lurah yang merencanakan terget kinerja dengan baik dan melaksanakannya dengan tepat dan baik.

4, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diukur dengan *satu* indikator yaitu :

1. Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam musrenbangkot. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 70% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan tahun 2022 sejumlah 42 usulan dari total usulan masyarakat sejumlah 60 usulan. Ketercapaian target indikator didukung oleh pendampingan Kecamatan dalam mengawal usulan masyarakat yang diakomodir ke dalam musrenbangkot.

Program *Penyelenggaraan* Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Jumlah usulan dalam musrebangcam dengan target sebesar 60 usulan dan terealisasi sebesar 42 usulan sehingga capaiannya sebesar 70%. Capaian ini berdasarkan jumlah usulan musrenbang tingkat kecamatan yang masuk dalam prioritas yang tercapai sejumlah 42 usulan dari total target usulan musrenbang tingkat kecamatan sejumlah 60 usulan. Ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan adanya pembatasan usulan yang masuk kedalam usulan prioritas musrenbangkot.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
1.2.2 Anggaran	
1.3 Dasar Hukum	
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	
3.1.2 Membandingkan antara terget dan realisasi tahun pelaporan.....	
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan	

	kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
3.1.8	Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
3.2	Realisasi Anggaran	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2021) dan Tahun n (2022)Tabel
2. Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis
3. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n
4. Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
5. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bugul KIDul Kota Pasuruan Tahun 2022
6. Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Bugul Kota Pasuruan Tahun 2022
7. Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota PasuruanTahun 2022
8. Tabel 3.1 Pengkatagorian Capaian Kinerja
9. Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022Perbandingan
10. Tabel 3.3 Capaian Kinerja
11. Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran strategis
12. Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi
13. Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan SasaranAnalisis
14. Tabel 3.8 Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
15. Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bugul Kota Pasuruan

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, Kecamatan Bugul Kidul menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

LKjIP tahun 2022 telah berpedoman pada Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Bugul Kidul) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Bugul Kidul dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Bugul Kidul;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Bugul Kidul pada tahun berikutnya.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tugas kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

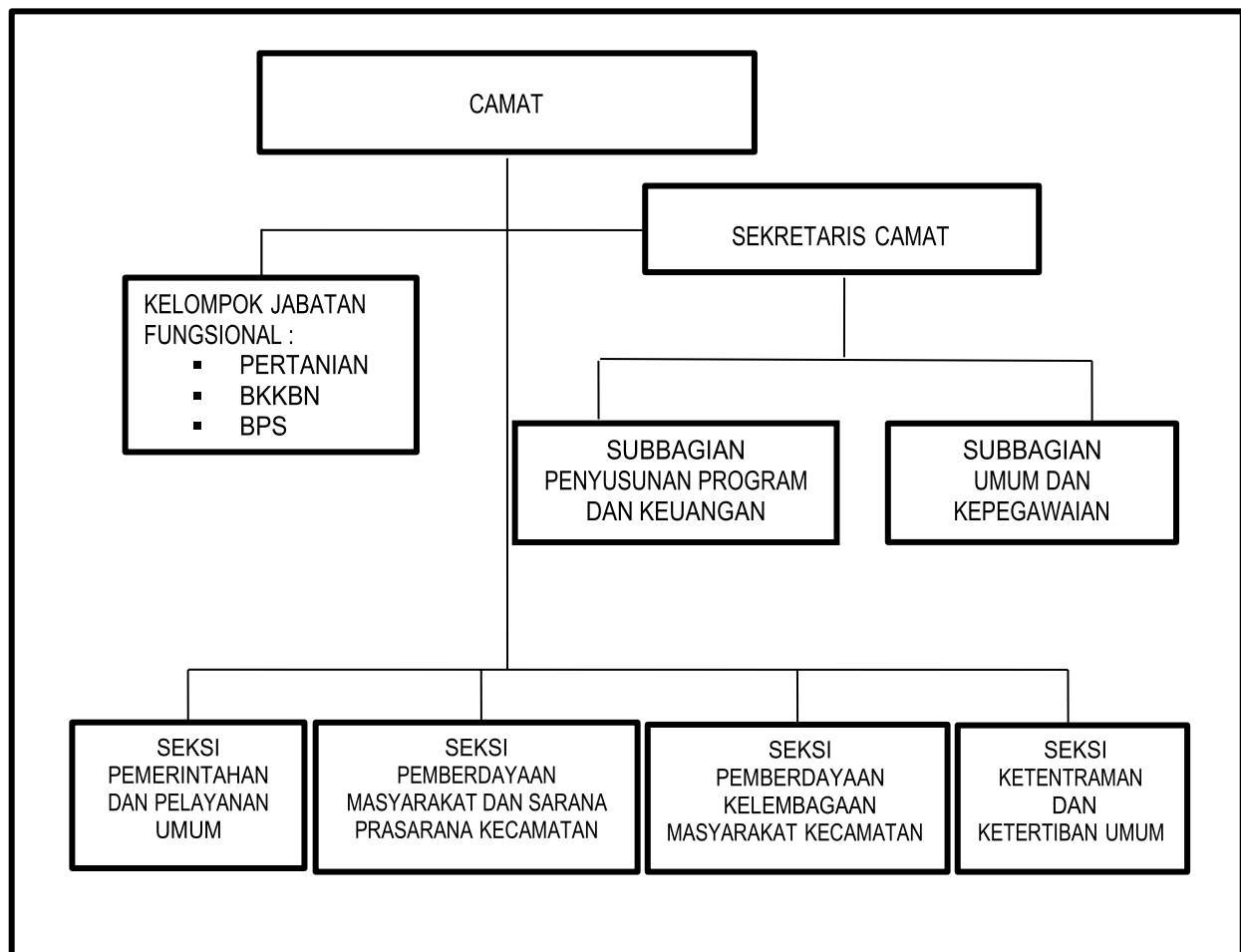
- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Wali Kota;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Yang Ada Di Kecamatan;
- i. Melaksanakan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Wali Kota Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
- j. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan/Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Kelurahan; Dan
- k. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Wali Kota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Tersebut Diatas, Kecamatan Mempunyai Fungsi :

- a. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian, Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Di Wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Kecamatan;
- d. Dan Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan.

Berikut Ini Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bugul Kota Pasuruan



Sumber: Lampiran Peraturan Walikota (PERWALI) No 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.2.2 Anggaran

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2021) dan Tahun n (2022)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2021	12.712.490.832
APBD	2022	12.237.066.276

Sumber : Dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

1.2.2 Isu Strategis

Memperhatikan Isu Strategis Kota Pasuruan dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, maka Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Masih Perlunya Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka optimalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan. Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan.

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Bugul Kidul adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik terpenuhi secara konsisten sehingga aparatur memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan prima.

2. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Bugul Kidul masih belum terintegrasi dengan program-program terkait pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan. Serta belum optimalnya peran Lembaga pemberdayaan dan masyarakat dalam menginisiasi dan berpartisipasi dalam upaya-upaya pemberdayaan.

3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Kecamatan Bugul Kidul juga mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban serta Pelindungan Masyarakat. Dalam hal ini keterlibatan personal LINMAS di Kelurahan belum optimal. Selain itu, tingkat heterogenitas penduduk di Kecamatan Bugul Kidul juga tinggi. Maka, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berpotensi meningkat , dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum memerlukan harus selalu dioptimalkan.

1.2 Dasar Hukum

Laporan kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota (PERWALI) No 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.1 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Bugul Kidul dan Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.1 Visi

Dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021–2026, maka Visi Kota Pasuruan yaitu :

Pasuruan Kota MADINAH “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmonis Warganya”

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Pasuruan Kota MADINAH “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmonis Warganya”, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021-2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah :

2.1.2.1 Maju Ekonominya

- a. Pembukaan Lapangan Pekerjaan;
- a. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
- b. Pengembangan Wisata Terintegrasi (Religi, *Heritage*, Edukasi, dan Kampung Tematik);
- c. Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga;
- d. Revitalisasi BUMD dalam Penguatan Pendapatan Daerah.

2.1.2.2 Indah Kotanya

- a. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang ramah dan nyaman.

2.1.2.3 Harmonis Warganya

- a. Pendidikan Gratis Berkualitas;
- b. Kesehatan Gratis, Standardisasi Fasilitas Kesehatan, dan Percepatan Penanganan *Covid-19*;
- c. Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang Melayani;
- d. Kemudahan Layanan 1 Pintu Sehari Pasti Jadi.

Dari capaian yang dimanifestasikan kedalam 10 (sepuluh) Agenda Prioritas di atas, misi yang menjadi acuan dari Kecamatan Bugul Kidul adalah misi ke 4 (empat) yaitu Tranformasi Layanan Publik Yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif, dengan isu strategis Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Kecamatan Bugul Kidul sebagai perangkat daerah yang membawahi beberapa sub unit yaitu kelurahan merupakan koordinator dari segala program kegiatan yang ada di kelurahan yang juga berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Kecamatan Bugul Kidul adalah pada misi IV sehingga Kecamatan Bugul Kidul memiliki 2 tujuan sebagaimana berikut:

Tujuan	
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Indikator	
Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Kecamatan Bugul Kidul pada misi IV yaitu:

Sasaran	
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
Indikator	
Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif
Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard	Persentase Usulan Musrenbangcam yang disampaikan dalam Forum PD

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut di atas maka akan kami tampilkan tabel terperinci terkait tujuan sasaran beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Bugul Kidul pada tahun 2021-2026, sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	85%	86%	87%	88%	89%	90%
		Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	50%	50%	100%	100%	100%	100%
			Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	60%	70%	75%	80%	95%	90%
		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Usulan Musrenbangam yang Disampaikan dalam Forum PD	69%	70%	80%	85%	90%	95%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan		Nilai PMPRB (penilaian mandiri)	70%	70%	70%	75%	80%	90%

	n perangkat daerah		pelaksanaan Reformasi Birokrasi)						
		Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	B	B	B	B	BB	BB
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Renstra Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Periode 2021 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama (dijelaskan dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi rumus hitung) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bugul Kidul

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Metode/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan Pelayanan terintegrasi (Tahun n)}}{\text{Jumlah total kelurahan (Tahun n)}} \times 100$	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Camat
	Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai	$\frac{\text{Jumlah laporan trantib yang ditindaklanjuti (Tahun n)}}{\text{Jumlah total laporan (Tahun n)}} \times 100$	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Meningkatnya Keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	$\frac{\text{Jumlah lembaga masyarakat yang aktif (Tahun n)}}{\text{Jumlah lembaga masyarakat (Tahun n)}} \times 100$	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan	
	Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam	$\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD (Tahun n)}}{\text{Jumlah usulan yang masuk (Tahun n)}} \times 100$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	
Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	$\frac{62,50}{62,50} \times 100$	Sekretaris Camat	
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti (Tahun n)}}{\text{Jumlah temuan (Tahun n)}} \times 100$	Sekretaris Camat	
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	$\frac{\text{Jumlah kegiatan program dukungan SKDP yang tercapai (Tahun n)}}{\text{Jumlah kegiatan program dukungan SKDP (Tahun n)}} \times 100$	

Pada Metode Formulasi Perhitungan terdapat tiga sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama. Sumber Data yang digunakan adalah Sumber Data dari Kasie terkait dan Sekretaris Camat. Data didapatkan dari realita lapangan yang dirumuskan dengan satu metode

formulasi perhitungan, diantaranya:

1. Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi dapat dihitung dengan jumlah kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan terintegrasi dibagi jumlah kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul dikali 100%. Sumber Data didapatkan dari Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
2. Persentase Laporan Trantibmas yang Ditindaklanjuti sesuai Standard memiliki formulasi perhitungan Jumlah Laporan Trantibmas yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah total Laporan Trantibmas dikali 100%. Sumber Data didapatkan dari Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum;
3. Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif dapat dihitung dengan Jumlah Lembaga masyarakat yang aktif dibagi dengan total lembaga masyarakat dikali 100%. Sumber data didapatkan dari Kasie Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat;
4. Persentase Usulan Musrenbangcam yang disampaikan dalam Forum PD dihitung dengan Jumlah usulan Musrenbangcam yang disampaikan dalam Forum PD dibagi dengan Jumlah total usulan dikali 100%. Sumber data didapatkan dari Kasie Pemberdayaan dan Sarana Prasarana;
5. Nilai SAKIP SKPD adalah B (Metode Perhitungan LHR). Data didapatkan dari Sekretaris Camat Bugul Kidul;
6. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti dihitung dari Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah temuan dikali 100%. Data didapatkan dari Sekretaris Camat Bugul Kidul;
7. Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD dihitung dengan Jumlah Kegiatan Program Dukungan SKPD yang tercapai dibagi dengan Jumlah Kegiatan Program Dukungan SKPD dikali 100%. Data didapatkan dari Sekretaris Camat Bugul Kidul.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang tertuang pada RENSTRA Kecamatan Bugul Kidul memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan Bugul Kidul adalah 86. Perhitungan didapatkan dari Aplikasi IKM yang terintegarsi dengan Provinsi Jawa Timur yakni Sukma Prov Jatim;
2. Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan terintegrasi memiliki Target Kinerja 50% Pada Tahun 2022. Artinya, 3 Kelurahan dari 6 Kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul ditargetkan telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi.

3. Persentase Laporan Trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard memiliki target 100% Pada Tahun 2022;
4. Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang memiliki Target 70% Pada Tahun 2022.
5. Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif memiliki Target 100% pada tahun. 2022. Artinya 7 Kelembagaan Masyarakat dari Total 7 Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Bugul Kidul ditargetkan aktif.
6. Persentase Usulan Musrembangcam yang disampaikan dalam forum PD memiliki target 70% Pada Tahun 2022.
7. Nilai PMPRB memiliki target 70%
8. Nilai Sakip PD memiliki Target dengan Predikat B
9. Persentase temuan yang ditindaklanjuti memiliki target 100%, dan
10. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD memiliki Target 100% Pada Tahun 2022.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Nilai	86
		Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	%	50%
			Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard	%	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	%	70%
		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	%	100%
			Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	%	70%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan		Nilai PMPRB (penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Nilai	70%

	perangkat daerah	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	B	
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	%	100%	
			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	%	100%	

Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan 2022

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Dapat dijelaskan sasaran strategis dan indikator berdasarkan Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan oleh Camat Bugul Kidul Kota Pasuruan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022

Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	50%	50%
	Persentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%
Meningkatnya Keberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan masyarakat yang aktif	100%	100%
	Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	70%	70%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.9.085.338.487,00	Rp.9.379.799.484,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.31.773.700,00	Rp.31.773.700,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.324.250.100,00	Rp.192.718.200,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.231.576.700,00	Rp.231.576.700,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	
		5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah		Rp. 9.742.237.587,00	Rp.9.905.166.684,00

Dapat dijelaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada table dibawah ini:

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Bugul Kota Pasuruan
Tahun 2022

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Usulan dalam Musrebangcam	60%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Usulan dalam Musrebangcam	120
	Sub Kegiatan : Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan	100%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina	100%
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	7
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-Jumlah buku profil layak anak yang di susun -Jumlah guru qori yang difasilitasi -Jumlah jenis lomba TP	14 18 32

	PKK Kecamatan	
	-Jumlah peserta fasilitasi pertemuan forum anak kecamatan Bugul Kidul	30
	- Jumlah peserta pelatihan kelembagaan praktis Kecamatan	40
	- Jumlah peserta pelatihan LPM Kecamatan	28
	- Jumlah peserta rapat koordinasi pembinaan UKS Kecamatan	30
	- Jumlah peserta rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	60
	- Jumlah peserta rapat koordinasi Kecamatan Sehat	30
	- Jumlah peserta rapat koordinasi PKK Kecamatan dan Kelurahan	540
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bakalan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Di Bina	540
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kelurahan	65
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan	7

Kelurahan	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Krampyangan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Di Bina	8
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Blandongan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Di Bina	8
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kepel	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Di Bina	10

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Di Bina	10
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tapaan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Di Bina	10
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	10

		Pembangunan di Kelurahan	
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100%
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu	30
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-Jumlah bantuan nasi bungkus yang diberikan - Jumlah personil PATROLI wilayah - Jumlah peserta lomba pos siskamling tingkat Kecamatan Bugul Kidul - Jumlah peserta pembinaan personil LINMAS Kecamatan - Jumlah peserta rapat Evaluasi Hasil Patroli Wilayah - Jumlah peserta rapat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat - Jumlah petugas penyemprotan disinfektan	2049 720 6 18 60 60 336 730

		- Jumlah tenaga pengamanan Kecamatan Bugul Kidul	
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Bakalan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	7
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Petugas Keamanan Kantor Kelurahan	365
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Krampyangan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	7
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Petugas Keamanan Kantor Kelurahan	365
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Blandongan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	7
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-Jumlah Hari Petugas Keamanan Kantor Kelurahan -Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kelurahan Blandongan	365 348
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kepel	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	7

	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Petugas Keamanan Kantor Kelurahan	365
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	7
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Petugas Keamanan Kantor Kelurahan	219
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Tapaan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	7
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Petugas Keamanan Kantor Kelurahan	365
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	50%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Di Kecamatan Bugul Kidul	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)	6
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-Jumlah buku register yang di cetak	15
		-Jumlah jenis buku Kecamatan Dalam Angka yang di susun	25
		- Jumlah jenis Data Monografi Kecamatan	8

	yang dihasilkan - Jumlah pelayanan kependudukan, catatan sipil dan pelayanan umum yang diberikan - Jumlah peserta lomba Kelurahan Berkembang - Jumlah peserta pembinaan Kelurahan Berkembang di Kecamatan Bugul Kidul	500 6 70
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Bakalan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)	6
Sub Kegiatan : Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-Jumlah RT RW yang Mendapat Biaya Operasional - Jumlah Pemohon Layanan Urusan Pemerintahan Umum di Kelurahan Bakalan	38 2000
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Krampyangan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)	6
Sub Kegiatan : Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-Jumlah Buku Monografi Kelurahan yang Dihasilkan - Jumlah pelayanan kependudukan, catatan sipil dan pelayanan umum yang diberikan - Jumlah Peserta Rapat RT	15 52 192

		dan RW	
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Blandongan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)		6
Sub Kegiatan : Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-Jumlah Buku Monografi -Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan yang dihasilkan Terupdate - Jumlah Jenis Data Pemerintahan di Kelurahan Blandongan - Jumlah Peserta Rapat RT dan RW		30 8 16 32
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Kepel	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)		6
Sub Kegiatan : Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Kepel - Jumlah pelayanan kependudukan, catatan sipil dan pelayanan umum yang diberikan - Jumlah Peserta Rapat RT dan RW Kelurahan Kepel		8 624 28
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Bugl Kidul	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)		6
Sub Kegiatan : Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-Jumlah Data Monografi Kelurahan Bugul Kidul - Jumlah Peserta Rapat RT dan RW Kelurahan Bugul		10 450

		Kidul - Jumlah Peserta Sinkronisasi Data RT/RW Kelurahan Bugul Kidul	600
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Tapaan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)	7
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-Jumlah Data Monografi Kelurahan Tapaan - Jumlah pelayanan kependudukan, catatan sipil dan pelayanan umum yang diberikan -Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Tapaan	6 400 240

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.999.790
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.004.626.623
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.730.486
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.426.900
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.452.155
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.332.600
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bugul Kidul	784.875.200
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bakalan	116.576.807
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Krampyangan	91.678.136
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Blandongan	116.260.531
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kepel	126.073.108
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bugul Kidul	117.735.700

13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tapa'an	119.915.300
14.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.512.830
15.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.773.700
16.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Bugul Kidul	192.718.200
17.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bakalan	10.083.440
18.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Krampyangan	18.721.800
19.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Blandongan	31.365.600
20.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kepel	22.959.600
21.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bugul Kidul	10.050.550
22.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tapa'an	19.119.880
23.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalan	12.100.310
24.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blandongan	10.041.300
25.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blandongan	10.041.300
26.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugul Kidul	20.000
27.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bakalan	113.434.410
28.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krampyangan	133.396.430
29.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Blandongan	121.329.200
30.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepel	122.133.000
31.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul	48.091.250
32.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tapa'an	127.499.920
33.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bugul Kidul	231.576.700
34.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Bakalan	19.324.000
35.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Krampyangan	20.207.600
36.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Blandongan	33.187.900
37.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kepel	38.396.700
38.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Bugul Kidul	11.409.300
39.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	28.832.830

	Umum di Kelurahan Tapa'an	
40.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Bugul Kidul	69.298.600
41.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Bakalan	127.812.000
42.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Krampyangan	65.480.020
43.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Blandongan	120.055.800
44.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Kepel	112.190.410
45.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Bugul Kidul	155.007.400
46.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kelurahan Tapa'an	113.509.300

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkatagorian Capaian Kinerja

No	Katagori/Interpretasi	Rata-rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Katagori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	a. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan	50%	0%	0	Sangat Rendah	Seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum

		terintegrasi b. Persentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum
2	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif b. Persentase usulan Musrenbangca m yang disepakati dalam forum PD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
			70%	70%	100%	Sangat Tinggi	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Sarana Prasarana
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	a. Nilai SAKIP SKPD b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	B 100%	B 100%	100%	Sangat Tinggi	Sekretaris Camat
			100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
			100%	100%	100%	Sangat Tinggi	

Sumber : Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Pada tabel 3.2 diatas, menyajikan data capaian realisasi indikator kinerja utama pada 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7(tujuh) indikator, sebagaimana berikut:

Sasaran ke-1: Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi dengan capaian 0%, hal ini karena tidak didukungnya SDM dalam pengelolaan aplikasi

SIMAK (Sistem informasi manajemen administrasi kelurahan) aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara kecamatan dan dinas Kominfo, pada aplikasi ini tersedia beberapa template surat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan permintaan surat-surat keterangan, format surat tersebut juga sesuai dengan tata naskah dinas sehingga kami dapat memberikan pelayanan terkait pelayanan umum yang mendukung pelaksanaan pelayanan khusus kelurahan dan kecamatan. Penggunaan aplikasi ini belum terintegrasi antara kelurahan dan kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Sehingga proses masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi.

2. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart dengan capaian 100%, capaian ini dihasilkan dari jumlah laporan pada tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Untuk mewujudkan capaian tersebut, terdapat dukungan dari program dan kegiatan yaitu:

Program	Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran ke-2: Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan, dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan capaian 100%, capaian ini dihasilkan dari jumlah lembaga yang dibina oleh Kecamatan Bugul Kidul seluruhnya aktif dalam arti dapat mengikuti kegiatan di masyarakat.
2. Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD dengan capaian 70%, capaian ini dihasilkan dari 43 usulan yang disampaikan dalam forum PD dari total 60 usulan.

Untuk mewujudkan capaian tersebut, terdapat dukungan dari program dan kegiatan yaitu:

Program	Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran ke-3 : Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Nilai sikip SKPD dengan target B dan realisasi B sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Ketercapaian kinerja tersebut didukung oleh Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan melakukan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja sehingga ada pemanfaatan dalam penyusunan perencanaan kinerja di tahun berikutnya dan upaya-upaya perbaikan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian sasaran.
2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian tersebut berdasarkan tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bugul Kidul.
3. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan dari pencapaian 8 (delapan) kegiatan pendukung sebesar 100%.

Program	Kegiatan
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	a. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	0%	0%	50%	0	0
		b. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya keberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan	a. Persentase kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase usulan Musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	100%	100%	70%	70%	100%

3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	a.Nilai SAKIP SKPD	A	BB	B	B	100%
		b.Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022

Uraian penjelasan tabel :

1. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat mempunyai indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Bugul Kidul kota Pasuruan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi pada Tahun 2020 adalah 0%, tahun 2021 belum bisa direalisasikan (0%). Pada tahun 2022 ditargetkan 50% tapi ternyata masih belum bisa direalisasikan oleh kelurahan-kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Sehingga target belum tercapai.
 - b. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard pada tahun 2020 hingga tahun 2022 ditargetkan 100% dan bisa terealisasi semuanya (100%). Sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai seluruhnya (100%).
2. Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan mempunyai indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase kelembagaan Masyarakat yang aktif, pada tahun 2020 Terealisasi 100%, 2021 mampu terealisasi semuanya 100%. Pada tahun 2022 ditargetkan 100%, dan bisa terealisasi seluruhnya. Sehingga target berbanding lurus dengan capaiannya (100%).
 - b. Persentase usulan Musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD. Pada tahun 2020-2021 semua usulan hasil Musrenbangcam bisa direalisasikan semua 100%. Dan pada tahun 2022 ditargetkan 70% dan bisa teralisasi semuanya 70%. Sehingga yang ditargetkan tercapai 100%.
3. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima mempunyai indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai saki SKPD pada Tahun 2020 terealisasi A, Tahun 2021 B, dan Tahun 2022 dengan target B dan realisasi B sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Ketercapaian kinerja tersebut didukung oleh Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan melakukan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja sehingga ada pemanfaatan dalam penyusunan perencanaan kinerja di tahun berikutnya dan upaya-upaya perbaikan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian sasaran.
- b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti mulai Tahun 2020 hingga Tahun 2022 adalah 100%. Hal ini karena tidak adanya temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bugul Kidul.
- c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Pada 2020-2022 dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan dari pencapaian 8 (delapan) kegiatan pendukung sebesar 100%.

1.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan periode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Kemajuan Capaian Sasaran strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tahun n	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 4/5*100
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	a. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	0	100%	0

		b. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%	100%
2	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Persentase kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
		b. Persentase usulan Musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	100%	100%	100%
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	a. Nilai SAKIP SKPD	B	B	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%

Sumber : Renstra 2021-2026 Kecamatan Bugul Tahun 2022

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

-Tidak ada

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	a. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	50%	0	0	Kegagalan : 1. Kurang siapnya SDM aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan terintegrasi 2. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana	Solusi : 1. Adanya sosialisasi (APLIKASI SIMAK) terhadap karyawan demi terselenggaranya pelayanan terintegrasi di Kecamatan Bugul Kidul 2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
		b. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%	100%	Keberhasilan: 1. Masyarakat merasa direspon laporannya dengan cepat 2. Dilakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga bisa sinergi antara aparatur dengan masyarakat	Solusi: 1. Pimpinan selalu menghimbau kepada aparatur agar merespon dengan sigap dan cepat segala bentuk pengaduan dari masyarakat 2. Apabila ada informasi yang kurang jelas, segera diberi

							penjelasan dan pemahaman
2	Meningkatnya keberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan	a. Persentase kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	Keberhasilan: 1. Kemudahan komunikasi menyebabkan mudahnya koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat	Solusi: 1. Aparatur selalu hadir di setiap kegiatan yang ada di masyarakat
		b. Persentase usulan Musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	70%	70%	100%	Keberhasilan : 1. Menampung aspirasi dari masyarakat melalui musrenbangcam	Solusi: 1. Lebih mendahulukan usulan yang diperkirakan darurat seperti: penanggulangan banjir,
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	a. Nilai SAKIP SKPD	B	B	100%	Keberhasilan: Evaluasi SAKIP tercapai 100% sesuai target. Karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik, sehingga memberi dampak nyata dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.	Solusi : Melakukan pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan-pembahasan yang dilakukan secara berkala (tribulan) serta didokumentasikan dan dituangkan dalam Notulen;
		b. Persentase temuan yang	100%	100%	100%	Keberhasilan: Capaian tersebut	Solusi: Capaian kinerja

		ditindaklanjuti				berdasarkan tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bugul Kidul.	harus dipertahankan dan melakukan pemantauan yang tepat dan efektif
		c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	Keberhasilan: Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya atas programnya.	Solusi: Hasil evaluasi (MONEV) dapat disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumber : Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Bugul Kota Pasuruan

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	a. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	50%	0%	0%	763.353.530,-	725.296.189,-	95,01%
		b. Persentase laporan trantibmas yang	100%	100%	100%	382.935.030,-	370.939.790,-	96,86%

		ditindaklanjuti sesuai standard						
2	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Persentase kelembagaan Masyarakat yang aktif b. Persentase usulan Musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	100% 70%	100% 70%	100% 100%	993.064.890,- 31.773.700,-	710.174.230,- 31.773.700,-	71,51% 100%
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	a. Nilai SAKIP SKPD b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	B 100% 100%	B 100% 100%	100% 100% 100%	- - Rp.10.065.939.126	- - Rp.9.480.928.314	- - 94,18%

Sumber : Anggaran Perubahan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2022

Uraian penjelasan tabel :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang memiliki 2 (dua) indikator yaitu:
 - a. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi dengan capaian indikator kinerja 0% namun capaian anggaran terserap sebesar 95,01% dari total anggaran belanja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Hal tersebut dikarenakan ada kendala terkait tindaklanjut aplikasi SIMAK antara masing-masing kelurahan dengan Dinas KOMINFOTIK. sehingga Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum dilakukan tidak menggunakan sistem terintegrasi. Hasil dari Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum adalah Buku Monografi, Buku Kecamatan dalam Angka, Kegiatan pelayanan, dan Lomba Kelurahan Berkembang yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya.

- b. Indikator yang ke 2 (dua) yaitu, Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard memiliki indikator capaian kinerja 100% dan capaian anggaran sebesar 96,86% dari total anggaran Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Bugul Kidul.
2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan yang memiliki 2 (dua) indikator yaitu:
 - a. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan capaian indikator kinerja 100% dan capaian anggaran sebesar 71,51% dari total anggaran belanja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Bugul Kidul.
 - b. Indikator yang ke 2 (dua) yaitu, persentase usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam forum PD dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 100% dari total anggaran belanja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bugul Kidul.
 3. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima memiliki 3 indikator yaitu:
 - a. Nilai SAKIP SKPD memiliki target B dan realisasi B sehingga capaian indikatornya adalah 100%. Namun tidak memiliki capaian anggaran.
 - b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti memiliki target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya adalah 100%. Namun tidak memiliki capaian anggaran.
 - c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD memiliki capaian Indikator Kinerja 100%. Adapun capaian anggarannya adalah 94,18% dari total belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Bugul Kidul.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	<p>a. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</p> <p>b. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard</p>	<p>0</p> <p>100</p>	<p>a. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</p> <p>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</p>	<p>0</p> <p>100</p>	<p>Tidak Menunjang</p> <p>Menunjang</p>	<p>Kurang siapnya SDM aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan terintegrasi</p> <p>Dilakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga bisa sinergi antara aparatur dengan masyarakat</p>
2	Meningkatnya keberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan	<p>a. Persentase kelembagaan Masyarakat yang aktif</p> <p>b. Persentase usulan Musrenbangcam yang</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina</p> <p>Persentase usulan musrenbangcam yang</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p>	<p>Kemudahan komunikasi menyebabkan mudahnya koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat</p> <p>Menampung aspirasi dari masyarakat melalui musrenbangcam</p>

		disepakati dalam forum PD		han dan Pelayanan Publik	diakomodir dalam musrenbangkot			
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	a.Nilai SAKIP SKPD	100	-	-	-	-	-
		b.Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	-
		c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	100	Menunjang	Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya atas programnya.

Sumber : Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bugul Kidul adalah:

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang memiliki 2 (dua) indikator yaitu:
 - a. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi dengan capaian indikator kinerja 0% yang merupakan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan indikator Programnya adalah Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi dan capaian Keberhasilannya adalah 0%. Analisis kegagalan target dan realisasi Indikator Kinerja Program tersebut adalah Kurang siapnya SDM aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan terintegrasi terkait tindaklanjut aplikasi SIMAK antara masing-masing kelurahan dengan Dinas KOMINFOTIK. sehingga Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum dan Indikator Programnya adalah dilakukan tidak menggunakan sistem terintegrasi.
 - b. Indikator yang ke 2 (dua) yaitu, Persentase laporan trantibmas yang

ditindaklanjuti sesuai standard memiliki indikator capaian kinerja 100% Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Bugul Kidul Indikator Programnya adalah Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu yang memiliki capaian 100%. Analisis keberhasilan program ini adalah adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga sinergitas antara aparatur dengan masyarakat terjalin dengan baik.

2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan yang memiliki 2 (dua) indikator yaitu:
 - a. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan capaian indikator kinerja 100% Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Bugul Kidul dengan indikator program Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina 100%. Analisis keberhasilan program ini adalah terjalannya komunikasi yang baik antara aparatur dengan lembaga-lembaga di masyarakat sehingga tercipta koordinasi yang baik.
 - b. Indikator yang ke 2 (dua) yaitu, persentase usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam forum PD dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 100% Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bugul Kidul dan indikator programnya adalah Persentase Usulan Musrenbangcam yang diakomodir dalam Musrenbangkot yang memiliki capaian 100%. Analisis keberhasilan program ini adalah terselenggaranya MUSREMBANG yang menampung aspirasi masyarakat di Kecamatan Bugul Kidul.
3. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima memiliki 3 indikator yaitu:
 - a. Nilai SAKIP SKPD memiliki target B dan realisasi B sehingga capaian indikatornya adalah 100%.
 - b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti memiliki target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya adalah 100%.
 - c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD memiliki capaian Indikator Kinerja 100% Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Indikator Programnya adalah Persentase Kebutuhan Penunjang pemerintahan yang terfasilitasi. Analisis Keberhasilannya adalah Kecamatan Bugul Kidul telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya atas programnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	763.353.530,-	725.296.189,-	95,01%
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	382.935.030,-	370.939.790,-	96,86%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	993.064.890,-	710.174.230,-	71,51%
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	31.773.700,-	31.773.700,-	100%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.065.939.126,-	9.480.928.314,-	94,18%

Uraian pada table diatas adalah sebagai berikut:

1. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran pada Tahun 2022 adalah Rp. 763.353.530,- dan terealisasi sejumlah Rp. 725.296.189,- Sehingga persentase Capaian Anggarannya adalah 95,01%.
2. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum anggaran pada Tahun 2022 adalah Rp. 382.935.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 370.939.790,- Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 96,86%.
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan anggaran pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 993.064.890,- dan terealisasi sebesar Rp.710.174.230,-. Sehingga

Persentase capaian anggarannya adalah 71,51%.

4. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik anggaran pada Tahun 2022 adalah Rp.31.773.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.31.773.700,00. Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 100%.
5. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran pada Tahun 2022 adalah Rp.10.065.939.126,00 dan Rp.9.480.928.314,00. Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 94,18%.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	0%	95,01%	0%
		Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard	100%	96,86%	96,86%
2	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	71,51%	71,51%
		Persentase usulan Musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	100%	100%	100%
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	.Nilai SAKIP SKPD	100%		-
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%		-
		Persentase rata-rata	100%	94,18%	94,18%

		ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD			
--	--	--	--	--	--

Uraian dari Tabel diatas adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dengan Indikator kinerja:
 - a. Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi memiliki capaian kinerja 0%, capaian anggaran 99,87%, dan tingkat efisiensi
 - b. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard memiliki capaian kinerja 100%. Capaian Anggaran 96,86%, dan Tingkat Efisiensi 96,86%
2. Meningkatnya Keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan indicator kinerja:
 - a. Persentase kelembagaan Masyarakat yang aktif memiliki capaian kinerja 100%, capaian anggaran 71,51%. Sehingga tingkat efisiensinya adalah 71,51%
 - b. Persentase usulan Musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD memiliki Capaian Kinerja 100%, capaian anggaran 100%. Sehingga Tingkat efisiensinya adalah 100%
3. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima dengan indeikator kinerja:
 - a. Nilai SAKIP SKPD adalah 100%
 - b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah 100%
 - c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD memiliki capaian kinerja 100%, dan capaian anggaran 94,18%. Sehingga tingkat efisiensinya adalah 94,18%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2022 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis/Program dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari tabel-tabel diatas bisa dilihat bahwa dari 4 Indikator sasaran yang dimiliki oleh Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan masuk kategori “Sangat Tinggi”. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kidul Kota Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kidul Kota Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2022 Kecamatan Kidul Kota Pasuruan berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan telah melebihi target, yaitu sebesar 100% dan capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Masyarakat telah melebihi target, yaitu sebesar 100%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kidul Kota Kota Pasuruan yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap sasaran dan program pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pasuruan.

Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja-sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

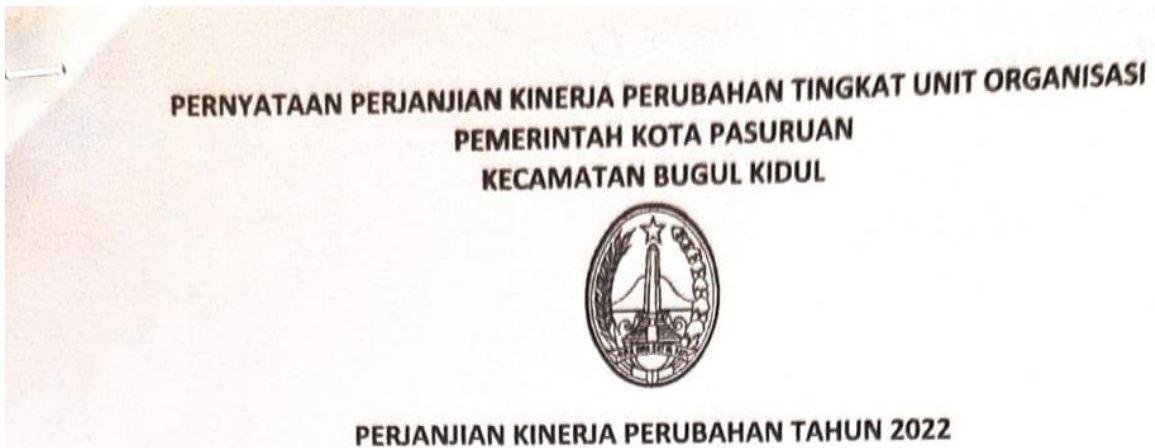
Pasuruan, 2022



CAMAT BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN
ALYASA AKBAR, S.STP
Penata TK. I
NIP. 19851029 200412 1 001

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALYASA AKBAR, S. STP**
Jabatan : Camat Bugul Kidul Kota Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**

Nama : **Drs. H. SAIFULLAH YUSUF**
Jabatan : Walikota Pasuruan

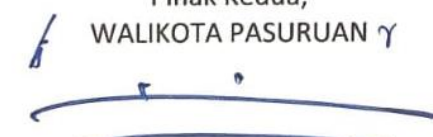
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut sebagai **pihak kedua**

Pihak pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA PASURUAN

Drs. SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
CAMAT BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN

ALYASA AKBAR, S. STP
Penata Tk. I
NIP. 19851029 200412 1 001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT DAERAH

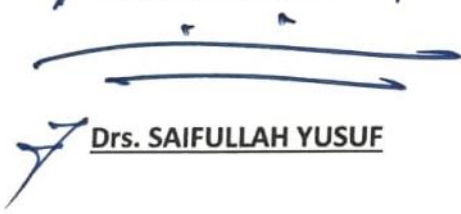
Jabatan : CAMAT BUGUL KIDUL
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Prosentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	50%	50%
	Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%
Meningkatnya Keberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan masyarakat yang aktif	100%	100%
	Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	70%	70%

No.	PROGRAM		Sebelum	Sesudah
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	9.085.338.487,-	9.379.799.484,-
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	31.773.700,-	31.773.700,-
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	324.250.100,-	192.718.200,-
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	231.576.700,-	231.576.700,-
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	69.298.600,-	69.298.600,-

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak Kedua,
 WALIKOTA PASURUAN



Drs. SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
 CAMAT BUGUL KIDUL
 KOTA PASURUAN



ALYASA AKBAR. S. STP
 Penata Tk. I
 NIP. 19851029 200412 1 001